



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke	: 26
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Sekretaris Jenderal Kementerian PP & PA.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 19 Februari 2020.
Waktu	: Pukul 10.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: 1. Target dan Sasaran Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2020; dan Masalah Aktual dan Alternatif Solusinya.
Ketua Rapat	: H.M.Ihsan Yunus, BA,B.Comm,ME.Con
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 27 dari 52 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 11 Orang Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Sekretaris Jenderal Kementerian PP & PA Beserta Jajaran.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.38 WIB dan dinyatakan terbuka.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI H.M.Ihsan Yunus, BA,B.Comm,ME.Con, dengan didampingi Ketua Komisi VIII H.Yandri Susanto, S.Pt dan Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak dan Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dengan agenda "**Target dan Sasaran Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2020 dan Membahas Masalah Aktual dan Alternatif Solusinya.**", disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI atas kinerja, target dan sasaran pelaksanaan program dan anggaran Tahun 2020.
2. Komisi VIII DPR RI berpendapat dan berpandangan bahwa Anggaran tahun 2020 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI sebesar Rp273.641.802.000,- (*Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Ribu Rupiah*) tidak memadai sehingga diupayakan adanya penambahan pada APBN-P Tahun 2020.
3. Komisi VIII DPR RI mendesak Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI agar dalam pengelolaan dan penyerapan APBN Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tahun 2020 dan penyelesaian permasalahan aktual terkait dengan perempuan dan anak dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah serta *stakeholders* terkait untuk menyelesaikan permasalahan perundungan terhadap anak dan perdagangan orang.
 - b. Mendesak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI untuk meningkatkan efektivitas kinerja lembaga pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak di lapangan dan melakukan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum terkait penanganan dalam tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan orang.
 - c. Memprioritaskan alokasi anggaran Tahun 2020 untuk program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui berbagai kegiatan preventif yang menyentuh langsung terhadap pencegahan peningkatan permasalahan anak dan

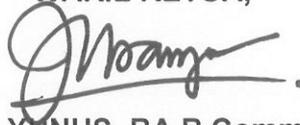
meningkatkan ketahanan keluarga.

- d. Meningkatkan pemerataan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan aspirasi daerah dan disinergikan dengan Anggota Komisi VIII DPR RI dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan.
- e. Melakukan sinkronisasi berbagai program pada setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan melakukan evaluasi atas program-program yang telah dilaksanakan sehingga capaian program lebih tepat sasaran.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 13.00 WIB.

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,



H.M.IHSAN YUNUS, BA,B.Comm,ME.Con.